

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunikasi organisasi merupakan topik penting dalam menjalankan organisasi, tidak terkecuali bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatra Barat (Kominfo Sumbar). Membangun hubungan yang baik dengan relasi di dalam maupun di luar organisasi menjadi penting mengingat organisasi membutuhkan kerja sama tim untuk mencapai tujuan bersama. Selain untuk mewujudkan tujuan, komunikasi dalam organisasi juga diperlukan dalam membangun rasa nyaman dalam lingkungan kerja.

Kominfo Sumbar sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menjalankan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatra Barat (PPID Utama). Terbentuknya PPID sebagai amanah dari Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang dibentuk untuk memberikan jaminan kebebasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi. Tanggung jawab yang dimiliki PPID adalah di bidang penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan informasi di badan publik. Informasi publik sendiri merupakan informasi yang disediakan oleh setiap badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bidang yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas PPID pada Kominfo Sumbar adalah bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP). Salah satu tugas PPID Utama adalah untuk mengumpulkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang diperoleh dari setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah tingkat provinsi atau disebut dengan PPID Pembantu. Provinsi Sumatra Barat sendiri memiliki lima puluh PPID Pembantu (Lampiran 2). Dengan demikian, PPID Utama dituntut untuk dapat membangun komunikasi yang baik dengan internal maupun eksternal organisasi untuk proses kelancaran kerja sama.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pengumpulan DIP mengalami kendala keterlambatan penyerahan oleh PPID Pembantu. Menurut keterangan dari Kepala bidang IKP, proses pengumpulan dimulai dengan memberikan surat permintaan penyerahan DIP pada awal tahun yang mana dalam surat tersebut disertakan waktu penyerahan kurang lebih satu bulan setelah surat tersebut diterbitkan. Namun pada waktu ini hanya beberapa DIP yang terkumpul dari beberapa PPID Pembantu.

Surat permintaan penyerahan DIP akan diterbitkan dua kali dalam satu tahun. Setelah surat permintaan penyerahan DIP yang kedua, biasanya jumlah DIP sudah meningkat meskipun belum drastis. Tahap selanjutnya yang dilakukan oleh PPID Utama adalah melakukan vakasi. Vakasi merupakan kunjungan dari PPID Pembantu untuk memenuhi undangan yang diberikan oleh PPID Utama. Pelaksanaan vakasi dilakukan dengan mengundang satu persatu PPID Pembantu. Vakasi dilaksanakan oleh tim vakasi yang terdiri dari perwakilan Badan Keuangan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatra Barat selaku PPID Utama, Biro Hukum, Inspektorat, dan

Kesatuan Bangsa dan Politik. Vakasi bertujuan untuk menggali data dan kegiatan dari tiap PPID Pembantu yang dapat dijadikan DIP.

Jumlah DIP yang dikumpulkan berbeda-beda pada tiap PPID Pembantu, tergantung pada kegiatan Dinas masing-masing. Kegiatan vakasi akan diakhiri dengan ditentukannya kembali waktu pengumpulan DIP. Pada waktu ini barulah DIP yang diterima oleh PPID Utama mengalami peningkatan. Namun demikian, beberapa OPD masih ada yang mengumpulkan dengan tidak tepat waktu.

Kominfo Sumbar juga melakukan pelayanan agar masyarakat dapat memperoleh informasi publik melalui satu pintu. Namun keterlambatan penyerahan DIP menyebabkan pelayanan ikut terkendala mengingat informasi publik yang harusnya tersedia tidak bisa dibuka karena informasi publik tersebut tidak ada pada PPID Utama. Informasi yang tidak tersedia tersebut dapat disengketakan oleh pemohon informasi publik. Sengketa informasi publik sendiri yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Sumatra Barat (KI Sumbar) yakni sebanyak 23 kasus pada tahun 2019, dan 11 kasus pada tahun 2020.

Kepala bidang IKP menambahkan bahwa untuk menaggulangi hal tersebut, telah diadakan sosialisasi berkala oleh PPID Utama untuk membahas mengenai DIP dan keterbukaan informasi publik ini. Telah dibuat pula grup pada aplikasi *whatsapp* untuk mempermudah PPID Pembantu jika ada hal-hal terkait DIP yang ingin ditanyakan. Namun, keterlambatan ini masih saja menjadi permasalahan berulang setiap tahunnya. Peneliti juga menemukan bahwa tidak ada sanksi tegas atas keterlambatan yang terjadi. Sanksi terberat yang diberikan adalah adanya surat teguran dari gubernur.

Keterbukaan informasi publik seharusnya menjadi media komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya baik dari pihak pemerintah sebagai pelaksana maupun masyarakat, sama-sama belum memberikan perhatian lebih terhadap hal ini. Peran komunikasi dalam organisasi turut menjadi perhatian, mengingat komunikasi adalah jembatan bagi segala informasi untuk dapat tersalurkan.

Komunikasi organisasi menurut Goldhaber merupakan proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam suatu jaringan hubungan yang saling ketergantungan untuk mengatasi lingkungan yang selalu berubah-ubah (Muhammad, 2005: 67). Pertukaran pesan tersebut dapat dilihat dari aliran komunikasi yang terdapat dalam organisasi, disamping itu komunikasi juga berperan penting dalam menciptakan suasana lingkungan kerja. Komunikasi ada sebagai dasar pengorganisasian manusia, sehingga memberikan landasan pemikiran untuk memahami cara manusia berorganisasi (Littlejohn, 2009: 364).

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai komunikasi organisasi pada PPID Utama. Peneliti ingin melihat dan mengetahui bagaimana PPID Utama membangun komunikasi organisasi kepada PPID Pembantu, sehingga terjadi sistem pengelolaan informasi seperti saat ini. Penelitian ini berjudul “Komunikasi Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatra Barat dalam Mengelola Informasi Publik”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian adalah bagaimana komunikasi organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatra Barat dalam mengelola informasi publik?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dijelaskan berdasarkan rumusan masalah di atas, antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan komunikasi organisasi PPID Provinsi Sumatra Barat dalam membangun hubungan internal organisasi dan relasi eksternal (PPID Pembantu).
2. Untuk mendeskripsikan proses pengelolaan informasi publik oleh PPID Provinsi Sumatra Barat.

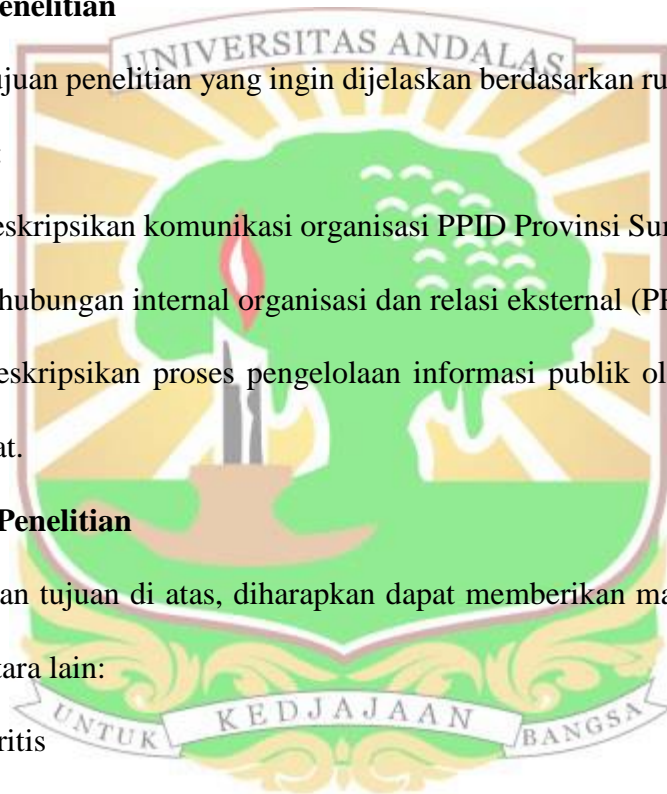
1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap mampu memberikan kontribusi secara ilmiah pada perkembangan ilmu komunikasi mengenai komunikasi organisasi terkhusus pada komunikasi dalam organisasi pemerintahan, serta memberikan gambaran ilmiah bagi peneliti lain yang melakukan studi penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis



- a. Bagi praktisi komunikasi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai komunikasi organisasi dalam lingkup pemerintahan daerah.
- b. Bagi pihak Kominfo Sumbar, penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dalam melakukan komunikasi organisasi di masa yang akan datang.

